

**TERORISME SEBUAH ANATOMI KEKERASAN
DENGAN EGO SUPERIOR SEKALIGUS
KETAKUTAN****1***Oleh : Surahman***ABSTRAK**

jika dialog mengalami dehumanisasi, kemungkinan akan terjadinya tindakan dan sikap anarkis semakin terbuka, dimana peluang gerakan teror (terorisme) terbuka lebar. gerakan teror memiliki peluang lahir dari kelompok manapun, baik dari kaum fundamental atau liberalis. Sehingga yang dibutuhkan adalah konstruksi peradaban yang berpihak pada ide universalisme dimana Athena dan Oikos, meminjam istilah Aristoteles bukan dua ruang berbeda, tetapi ia menyatu dalam institusi yang saling mengisi sehingga Athena, bukan sekedar lembaga negara, ia lebih merujuk pada pemaknaan sebagai kelembagaan sosial yang melindungi hak-hak warga (*oikos*), Sehingga makna kekuasaan sebagaimana kata Weber sebagai “setiap peluang untuk memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial juga kalau kehendak itu ditentang”. Kita tolak sebab menyebabkan kita terjebak pada semangat otoritarian kekuasaan. Kita perlu membangun model integrasi yang memungkinkan orang berproses meruntuhkan ego kemanusiaannya, Integrasi yang dimaksud adalah : integrasi sosial dan integrasi sistem.

Kata Kunci: Terorisme, Kekerasan dan Ego Superior**PENDAHULUAN**

Diskursus terorisme layak diletakkan pada kejelasan *platform*, apa terorisme, bagaimana metodologinya, gerakan sosial, termasuk ideologinya dan mengapa mereka mengambil jalan “teroris” sebagai alternatif perjuangan. Pertanyaan demikian penting diajukan, mengingat klaim sebagai teroris dipersonifikasikan pada mereka yang memilih gerakan sempalan sebagai alternatif bagi kekecewaannya terhadap realitas. Kemudian klaim sebagai gerakan ideologi fundamentalis yang dilekatkan kepada mereka sangat kuat. Sehingga, kaum fundamentalis agama dianggap sebagai kelompok rentan dan mudah meletakkan serpihan argumentasi yang radikal

saat memberi jawaban terhadap realitas, selanjutnya mengambil ideologi yang bersentuhan langsung dengan terorisme.

Sudut pandang metodologinya membingungkan, sebab klaim demikian menyesatkan. Sebagaimana kata Frans Magnis Suseno, fundamentalisme merupakan pandangan teologi Atau penghayatan keagamaan, seseorang mendasarkan seluruh pandangan-pandangan dunianya, nilai-nilai hidupnya pada ajaran eksplisit agamanya (2002).

Istilah fundamentalisme menjadi terkenal dan sering dipakai saat gerakan kaum reaksioner Kristen Amerika mengalami ancaman serius oleh teologi liberal, yang menjawab perubahan berdasar tafsir rasional. arus kuat teologi liberal mempengaruhi pandangan intelektual Amerika era 1870-an, fundamentalis merasa terancam eksistensinya. mereka memperkuat basis ideologi dengan melakukan serangan, fundamentalis “selalu benar” kitab merupakan sesuatu yang final, termasuk fisiknya.

sejarah panjang perdebatan dua arus besar teologi di Amerika era 1870-an, merupakan pertemuan dua kekuatan besar tadi, lalu, berujung pada pecahnya sekte yang mereka bangun, utamanya kelompok fundamentalis, salah satu penyebabnya, teologinya bersifat kaku. Tidak berkaca pada realitas yang dihadapi dan tidak menawarkan alternatif.

Terlepas dari makna yang mereka kembangkan, termasuk kerasnya tafsir terhadap pemahaman baru tersebut, fundamentalisme adalah mereka yang memegang nilai-nilai teologi dan ajaran agamanya secara ketat ketika bersentuhan dengan fenomena (termasuk realitas yang sedang berubah).

Sikap kritis yang patut dilakukan bagi pemaknaan demikian, apalagi jika berhubungan dengan agama-agama samawi yang menekankan pentingnya membangun silaturahmi ditengah peradaban yang berproses. Sehingga, baik kaum fundamentalis maupun kaum liberal secara bersama-sama membangun mekanisme dialog yang lebih berperadaban.

Kekhawatirannya, jika dialog mengalami dehumanisasi, membuka peluang pada tindakan dan sikap anarkis, dimana kemudian peluang menjadi gerakan teror (terorisme) terbuka lebar. Pemahaman ini sekaligus mengantar kita, bahwa gerakan terorisme memiliki potensi lahir dari kelompok manapun, apakah itu kaum fundamental maupun mereka yang mengklaim diri sebagai liberalis.

Meski saat ini berkembang asumsi, bahwa terorisme erat kaitannya dengan kaum fundamentalis.

Semua dasar tindakan mereka (fundamentalis maupun liberalis) berangkat dari masing-masing “kitab suci” yang mereka diemban. Sementara dalam nubuat agama-agama samawi terjadi kesepakatan tentang dua hal besar, yaitu, membangun kesadaran kemanusiaan sama pentingnya dengan pengakuan akan eksistensi sang Penguasa jagat raya. Dengan demikian, peluang untuk mempertemukan dua arus besar ini dalam satu dialektika pengetahuan sangat terbuka kemungkinannya, jika kerangka kemanusiaan menjadi dasar berpikir dari masing-masing sekte tersebut.

TERORISME DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN.

Sosiologi pengetahuan membangun perspektif dengan memperhatikan makna dan definisi realitas yang dimiliki anggota masyarakat. Setiap individu maupun kelompok masyarakat, mempunyai sekumpulan pengetahuan mengenai kehidupan dan dunianya yang berbeda antara satu dengan lainnya, dengan ditandai oleh berbagai makna sebagai bagian dari kreasi ideologi, oleh Peter Berger dan Luckmann disebut sebagai *universe of meaning*. Berger beranggapan bahwa, dunia makna berasal dari masyarakat sekaligus sebagai produk masyarakat dan pada gilirannya berproses membentuk masyarakat, termasuk sisten nilai dan pandangan hidupnya.

Sosiologi pengetahuan memahami, dunia makna bukan hanya landasan filosofis semata, namun ia berproses membentuk karakter manusia yang terimplikasi dalam kehidupannya. Sehingga berbagai problematika yang mereka pahami terbentuk dari ideologi yang diyakini. Dalam pandangan sosiologi pengetahuan pembentukan jati diri, baik secara individu maupun institusi berdasar pada ideology gerakan yang diemban.

Berkaitan dengan hal itu, maka kemunculan terorisme juga perlu dipahami sebagai bagian dari tafsir terhadap realitas yang mempengaruhi individu maupun institusinya. Artinya ada realitas yang ingin dicapai berdasar pada konteks makna yang diembannya. Para pelaku terorisme atau mereka yang berpotensi menjadi pelaku teror, bukanlah kelompok eksklusif, mereka adalah sebuah organ

yang mampu melakukan kerjasama dengan berbagai institusi yang berada di luar komunitasnya. Termasuk yang akan menjadi rival utamanya.

Awal maraknya gerakan teroris dunia, tersebutlah kaum Taliban yang secara bersama-sama membangun perjuangan dengan militer amerika, melakukan perlawanan terhadap invasi soviet di Afganistan. Ketika perjuangan tersebut berhasil dan soviet mundur, bersamaan dengan itu pula “kongsi” antara taliban dan militer AS pecah. “Fron” itu kemudian mengambil jalan berlawanan, dan secara otomatis ideology mereka juga berhadap-hadapan.

Munculnya ideology yang berbeda sekaligus bertentangan tersebut, tidak berarti mereka memiliki kekuatan seimbang, sebagaimana di era perang dingin. Justru sebaliknya, terjadi ketidak seimbangan kekuatan, baik disektor sumber daya maupun penguatan isu. Ketidak seimbangan tersebut kemudian memunculkan penindasan.

Uni soviet yang merupakan arus utama ideology sosialisme Marxis (pahan terakhir ini merupakan antithesis dari Igeologi kapitalisme yang dikembangkan oleh AS) kehilangan kekuatan, termasuk mesin perangnya, dimana selama ini menjadi penopang utama ideology tersebut. Perang dingin AS dan Soviet mereda. Tapi kemudian “perang dingin” atau mungkin “perang panas” antara Taliban dan AS berlangsung. Sehingga dua kutub ekstrim tersebut memposisikan diri sebagai rival.

“Kongsi” perjuangan pecah saat keberhasilan dicapai?. Jawaban simplifikatif dijelaskan dengan memakai perspektif sosiologi pengetahuan. Makna bukan sekedar landasan filosofis, dialektika membentuk karakter manusia yang terimplikasi dalam kehidupannya. Sehingga berbagai problematika yang mereka hadapi dibentuk oleh ideology tadi. Masing-masing berupaya memperkuat eksistensinya, terutama kelompok yang merasa belum mapan, sehingga berusaha melakukan ekspansi besar-besaran Ekspansi ini kemudian dipahami sebagai dasar pijakan melakukan tindakan penguatan ideology yang dianut sebagai landasan perjuangan

Bersamaan dengan “retaknya” soviet sebagai sebuah rezim ideology dan *nation state*, meski ideology sosialisme tetap bertahan, bahkan melakukan ekspansi di beberapa wilayah baru yang memiliki dasar sosialisme kuat, seperti di Amerika Latin, meski wilayah itu belum (tidak) memiliki mesin perang raksasa guna menjaga dan

melakukan ekspansi ideology seperti halnya soviet. Dan satu-satunya negara yang memiliki infrastruktur perang sangat kuat hanya AS.yang secara efektif mampu menjaga eksistensi kapitalisme global.

Bersamaan dengan realitas tersebut, sebagai sebuah negara dengan ideologi mapan, membutuhkan satu kekuatan pendamping yang berposisi sebagai “lawan” sekaligus berfungsi menjadi katup penyelamat bagi penguatan isu ideologi tadi.

Konteks demikian, anarkisme (gerakan terorisme? Tanda Tanya tersebut merupakan sikap keraguan saya memberi klaim) layaknya dilihat sebagai sebuah gerakan yang dibutuhkan, sebagai katup penyelamat dan klaim pembenaran bagi ekspansi ideologi.

Perlawanan terhadap kemapanan (anti establis) muncul akibat, masing-masing pihak saling butuh guna memperkuat eksistensi ideologinya.,Munculnya radikalisme gerakan ideologi, disebabkan oleh kekecewaan dan “provokasi” lawan. Gerakan perlawanan dipilih guna membangun kesadaran emosi massa, terutama basis institusi yang kecewa tadi. Mereka merasa tidak diuntungkan dari bangunan sistem sosial yang dikuasai oleh ideologi mapan, meski koalisi pernah berlangsung dalam perjuangan. Retaknya dua kutub dari sistem sosial yang berbeda dan selanjutnya memilih menjadi rival, menjadi fenomena menarik yang layak dipahami sebagai kerangka membangun eskalasi ideologi ekspansif, sebab, meski awalnya dipahami sebagai pilihan politik, dalam arti membangun kemitraan, saling mengambil manfaat. Kepentingan menghadirkan rival guna berfungsi sebagai katup penyelamat bagi eksisnya kemapanan ideologi, dipilih guna memberi argumentasi akan berbagai tindakan ekspansif bernuansa kekerasan. Perspektif demikian layak dipahami dalam dua tekstur yang melekat dan menjadi bagian dari ideologi yaitu, manusia dan politik. Konteks demikian mungkin cukup bijak jika kita merilis pendapat Hanna Arendt, filosof perempuan yang menjadi salah satu korban dari brutalnya rezim Nazi Hitler Jerman ini menulis, bahwa, “ Sang manusia itu politis, politik berlangsung diantara manusia-manusia, maka politik berada diluar manusia. Karena itu tak ada substansi politis”. Arendt seolah ingin membantah pada thesis Aristoteles bahwa manusia adalah mahluk *zoon politikon*, manusia adalah mahluk yang identik dengan politik, karena politik adalah diagnosis, dimana manusia merepresentasi diri di wilayah tersebut.

Kerangka perkembangan dan ekspansi ideologi yang politis dan diilhami cara berpikir dan menganggap diri sebagai ras unggul, sehingga manusia dipahami bukan realitas plural dan bertujuan membangun peradaban, dimana ada proses interaksi saling memahami keaneka ragaman. Anggapan bahwa, perang peradaban melahirkan homogenitas dan purifikasi dari rezim otoritarian yang sering bertindak atas nama peradaban, mereka mewakili ideologi tunggal dan klaim demikian sesungguhnya beringin membangun kemapanan singular dengan cara meruntuhkan peradaban lain.

Perspektif di atas menegaskan bahwa Arendt begitu kuat membangun perspektif, politik dalam realitas peradaban otoritarian adalah singular, dimana lakon utama pada manusia yang memberangus manusia lain dan politik substantif adalah rasialis. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak pembantaian terjadi atas nama membangun peradaban dan dibenarkan oleh realitas yang totalitarian tadi, contoh paling temporer adalah, pembasmian etnis bosnia oleh tentara Serbia. Sebab menurut mereka, yang dibantai bukan manusia, tapi Bosnia yang muslim,

Perdebatan (sebutlah diskursus berkepanjanga) dan saat ini lebih terindikasi pada perang ideologi pada dasarnya menggelisahkan kita, komunitas dari masing masing massa fanatik tersebut memberi perlakuan pada konsep singularitas tadi dan melawan realitas yang plural. Ideologi kapitalisme bagi kaum fanatiknya adalah manusia yang singular, demikian pula dengan sosialisme. Pertempuran peradaban berlangsung terus menerus, sehingga bangunan hipotesis Marx mengklaim bahwa, realitas yang konkrit adalah perang antar kelas (mereka yang tertindas dan yang menindas) sehingga perspektifnya juga dipahami sebagai perang antara kapitalisme dan sosialisme, antara manusia dalam substansi komunitasnya dengan mereka yang berada diluar eksistensinya. Manusia dalam dirinya kemudian diterjemahkan sebagai singular, peradaban bukan sesuatu yang pural.

Andaikan pluralisme menjadi rujukan, atau arus besar bangunan peradaban maka, lakon tidak lagi menjadi konsep dominasi yang bermuara pada singularitas (ideologi, maupun rumpun manusia) tapi yang utama adalah relasi dua kutub yang berbeda tajam, namun secara sadar membangun komunikasi peradaban. Manusia tidak terkonsentrasi oleh makna ekstrim, bahwa

sejarah perababan adalah perjuangan kelas, termaifestasi oleh semangat singularitas ideologi yang unggul.

Dialog peradaban, saling memberi makna, sebagai upaya membangun relasi diantara pelaku-pelaku politis, kegagalan komunikasi para aktor menjadi awal runtuhnya bangunan superstruktur dominan. Sehingga sebagaimana kata filsuf Jean-Paul Sartre “ sistem politis yang ditakdirkan untuk runtuh merangsang orang banyak untuk mempercepat keruntuhan itu” pertanyaannya siapa yang mempercepat keruntuhan itu, tidak lain adalah para pelaku singularitas dan memilih perang ideologi sebagai alternatif. Kebebasan dipersepsi bukan mata terlepas dari ikatan kolektifitas, melainkan kemampuan menentukan dan memberi ketegasan tentang hakekat diri secara bersama sebagai manusia yang plural.

Kembali ke thesis Arendt di atas bahwa “politik berlangsung diantara manusia-manusia maka politik berada di luar manusia”. Dalam konteks studi sosial, arendt mengantar kita untuk mengenal kelembagaan sebagai justifikasi proses interaksi. Proses adalah sebuah keniscayaan yang menjadi lakon kebebasan. “ mampu bertindak secara politis” demikian tulis arendt, juga diartikan sebagai bangunan kesadaran kebangsaan kita sebagai bangsa (aktor) dunia dengan mengintegrasikan diri pada kesadaran eksistensi tentang pentingnya mengelola hubungan – hubungan social, ada kesadaran solidaritas dalam dimensi oikos (keluarga) dan polis (kota)

Bertindak secara politik dari Arendt, mengingatkan kita pada filsuf, Aristoteles, politik dan hak-hak kebangsaan dibagi dalam dua kategori, yakni : *Oikos* (keluarga) dan Polis (kota) masyarakat politik sebelum sampai pada warga polis, membangun kesadaran intelegensinya tentang hak-hak kewarganegaraan awalnya dari keluarga. Sehingga berbagai tindakan anggota keluarga dalam kerangka membangun sistem politik kota. *Oikos* merupakan benteng dan tulang punggung polis.

Kota selanjutnya memperoleh legitimasi dari berbagai keluarga, (masyarakat) meski disadari, tidak semua oikos steril dari segala kepentingan, sehingga harus dikontrol lewat berbagai jaringan, keluarga atau masyarakat yang disebut dengan ruang public. Sehingga regulasi politik untuk polis (kota) terlegitimasi jika dalam proses konsultasi public, oikos menemukan substansi yang ditandai oleh adanya pengakuan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan demikian polis tidak sekedar dipahami sebagai Athena

(kota) institusi ini juga merepresentasi berbagai kepentingan keluarga dalam bentuk kehendak kolektif dalam bentuk ruang publik. Kota, dalam perjalanan selanjutnya, menjadi lakon konsolidasi yang bersifat keluarga, dalam arti proses berdimensi solidaritas bukan kekerabatan. Sebab dalam hal terakhir dapat berakibat pada dominasi menuju kediktatoran, sementara keluarga adalah mekanisme proses komunikasi, menentang pola kekerabatan dalam polis, pola kekerabatan terkandung strategi membangun zona-zona ruang privat yang memandulkan fungsi intermediasi sebagai institusi mediator masyarakat sipil dan negara.

Polis adalah komunitas keluarga yang telah menetap yang fungsi ekonomisnya dibeda-bedakan dan dikhususkan, agar kebutuhan para anggota masyarakat dapat dipenuhi. Masyarakat semacam itu mungkin jumlah anggotanya terbatas (kecil) Socrates berpendapat, adalah mungkin untuk memiliki polis yang anggotanya sedikit, karena populasi semacam itu akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomis dasar masyarakat. Masing-masing anggota polis menghasilkan barang dan jasa berdasar pada pola reproduksi yang mereka geluti, seperti Petani menghasilkan bahan baku makanan, penjahit dan pembuat sepatu menghasilkan pakaian, pekerja bangunan membangun rumah dan lain-lainnya. Tampaknya akan melengkapi semua fungsi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal polis, selanjutnya Socrates mengatakan bahwa : “ Polis sejati seperti manusia dalam keadaan sehat tetapi bila kau ingin kami mempelajari kota dalam keadaan tergesa-gesa, tiada sesuatu yang dapat menghentikan kami”. (David Melling 2002 : 139).

Pemikiran Socrates mencermintakan sesuatu yang kita kenal dengan kesederhanaan kehidupannya, cita-cita moral dari kehidupan filosof tersebut yang telah dimurnikan dan tanggung jawab akan kehidupan peradaban manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Plato, aspek nafsu dalam kebutuhan pribadi harus dikendalikan bila manusia ingin bertindak dengan cara yang benar secara rasional dan secara moral.

Bagi Plato Polis mengandung dua kategori yaitu, polis kaya, semua negara yang dianggap memiliki infrastruktur dan sumber daya lengkap dia sebut sebagai polis beradab. Sementara kedua, yaitu polis sederhana, seyogyanya melampaui polis dasar sebagaimana defenisi Socrates. Sebab menurutnya, polis demikian menjadikan

warga negara sebagai leviathan (meminjam istilah Hobbes) manusia saling memakan. Inilah polis terburuk dalam kebudayaan manusia.

Benarkan kategori plato tentang polis kaya merupakan cermin realitas negara beradab, menjawab hal ini, kita perlu memberi pemaknaan akan hakekat kepentingan negara kaya, sebagai wilayah yang berdaulat penuh atas haknya dan terkadang juga hak atau kedaulatan orang lain. Semangat sebagai negara dengan bangunan superstruktur kuat, dengan fasilitas lengkap, namun, sebagai institusi kaya tidak jarang ia memperoleh kekayaan dengan cara mengambil hak orang lain. Sehingga yang terjadi adalah semangat ekspansionis dari negara dimaksud. Artinya kebutuhan negara kaya bagi sebuah sistem pemerintahan yang kuat dan rakyat yang makmur, namun bergantung pada wilayah lain, jelas membahayakan sistem sosial.

Kita butuh polis yang tidak menjadi monster bagi komunitas lain, bahwa ia ada pada polis beradab, jelas. Negara harus tetap bertahan, (meski Marx menentangnya) kecukupan terhadap materi untuk menjamin eksistensi seluruh penduduk yang dimotivasi secara kuat. Sistem hukum diperlukan untuk mengendalikan warga kota dari kecenderungan tamak dan tindakan kriminal. Pemilikan pertahanan yang kuat juga dibutuhkan, bukan untuk mencamplok hak orang lain, tapi sebagai upaya membendung serangan keserakahan pihak luar.

Perspektif ini mengantar kita pada pemaknaan bahwa, Athena bukan sekedar lembaga Negara, ia juga merujuk pada pemaknaan sebagai kelembagaan sosial yang melindungi hak-hak warga (*oikos*). Kita akhirnya menolak makna kekuasaan (negara) yang dikemukakan oleh Weber sebagai “setiap peluang untuk memaksakan kehendak sendiri dalam sebuah hubungan sosial juga kalau kehendak itu ditentang”.

PENUTUP

Agar tidak terjebak pada perilaku leviathannya Hobbes, kita perlu menyimak konsep filosofi Jurgen Habermas. bahwa perlu adanya sebuah model integrasi yang memungkinkan orang berproses membangun kesadarannya bertindak. Integrasi demikian dia bagi atas dua bagian yaitu, integrasi sosial dan integrasi sistem.

Pertama mengacu pada bentuk koordinasi tindakan sosial secara fungsional dengan memperhatikan berbagai konsekuensi tindakan. Ia mengacu pada koordinasi tindakan sosial dengan

berupaya menyelaraskan orientasi tindakan yang merupakan orientasi bersama. Individu saling memahami norma sosial sebagai anutan bersama, oleh Emile Durkheim diistilahkan dengan *Conscience collectiva*, nilai atau paham dimasyarakat yang dipahami dan ditaati secara bersama.

Sementara pada yang kedua merujuk pada kenyataan obyektif, seolah-olah mengatur dirinya secara mekanis dan kenyataan ini bisa berada diluar kontrol individu. Kaitannya dengan integrasi sistem, masyarakat bukan sekedar eksternalitas, melainkan juga internalitas, bukan hanya terdapat kebutuhan-kebutuhan sosial, tetapi juga berbagai penafsiran akan hal itu yang tidak dapat seluruhnya diadaptasikan pada sistem.

Daftar Pustaka

- Beilharz, Peter, 2003, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Budi Hardiman, fransisco 2004, "Ruang Publik Politis, Komunikasi Politis dalam masyarakat majemuk" *Bentara*, Kompas No. 8 Tahun 5, 4 Agustus
- Haryatmoko, 2003, "Etika Politik dan Kekuasaan", Kompas, Jakarta
- Leksono-Supelli, Karlina, 2001 "Mendengarkan Suara Kesunyian, dalam Kristiyanto, Eddy (Ed) *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1992, "Filsafat Sebagai Ilmu Kritis", Pustaka Kanisius, Yogyakarta
- Magnis-Suseno, Franz, (et.al) 1993, "Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan", Gramedia, Jakarta
- Mannheim, Karl, 1997 "Ideology and Utopia", Routledge and Kegan Paul, London
- Melling, David, 2002, *Jejak Langkah Pemikiran Plato*, Bintang Budaya, Yogyakarta
- Rorty, Richart, 1993 "Human Rights, Rationality and Sentimentality" dalam Shule Stephen, et.al (ed) *On Human Rights*, The Oxford Amnesty lecture, New York
- Santoso, Thomas, 2002 "Teori-Teori Kekerasan", Ghalia Press dan Universitas Kristen Petra, Jakarta.
- Villa, Dana, (Ed) 1999, *Politics, Philosophy, Terror Essays on The Thought of Hanna Arendt*, Princeton University Press, Princeton
- Wilkinson, Paul, 1977, "Terrorism and the Liberal State", the Macmillan Press, London